



PENGUATAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI PEMBELAJARAN IPS DI SMP NEGERI 1 KOTA SEMARANG

Meika Juwita Hapsari, Noviani Achmad Putri

Social Science Education Department, Faculty of Social Science, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: Januari 2026

Direvisi: Maret 2026

Diterima: April 2026

Keywords:

Implementation, Anti-Corruption Education, Social Studies Learning

Abstrak

Fondasi awal pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan melalui penanaman Pendidikan Antikorupsi pada tingkat pendidikan. Salah satu caranya dengan penanaman nilai-nilai Antikorupsi melalui pembelajaran IPS. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan implementasi Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Kota Semarang 2) menganalisis penguatan Pendidikan Antikorupsi melalui pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Kota Semarang 3) mengidentifikasi hambatan yang dihadapi guru dan sekolah dalam penguatan Pendidikan Antikorupsi melalui pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melibatkan Waka Kesiswaan, Guru IPS, Agen SEMAI, dan Siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Kota Semarang, (a) pelaksanaan "Program Sekolah Jujur Sekolah Saya", (b) menanamkan dan memperkuat nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi, 2) Penguatan Pendidikan Antikorupsi Melalui Pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Kota Semarang, (a) materi pembelajaran IPS, (b) perencanaan pembelajaran, (c) proses pembelajaran, (d) evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran. 3) Hambatan Dalam Penguatan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang, (1) Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang, faktor internal dan faktor eksternal.

Abstract

The initial foundation for preventing corruption can be done through the instillation of Anti-Corruption Education at the educational level. One way is by instilling Anti-Corruption values through social studies learning. This study aims to: 1) describe the implementation of Anti-Corruption Education in SMP Negeri 1 Semarang City 2) analyze the strengthening of Anti-Corruption Education through social studies learning in SMP Negeri 1 Semarang City 3) identify obstacles faced by teachers and schools in strengthening Anti-Corruption Education through social studies learning in SMP Negeri 1 Semarang City. The research method used is descriptive qualitative involving the Vice Principal for Student Affairs, Social Studies Teachers, SEMAI Agents, and Students. The results of the study show that: 1) Implementation of Anti-Corruption Education in SMP Negeri 1 Semarang City, (a) implementation of the "My School Honest School Program", (b) instilling and strengthening the values of Anti-Corruption Education, 2) Strengthening Anti-Corruption Education Through Social Studies Learning in SMP Negeri 1 Semarang City, (a) Social Studies learning materials, (b) learning planning, (c) learning process, (d) evaluation or assessment in learning. 3) Obstacles in Strengthening Anti-Corruption Education in SMP Negeri 1 Semarang, (1) Anti-Corruption Education in SMP Negeri 1 Semarang, internal factors and external factors. (2) Anti-Corruption Education through Social Studies learning, (a) lack of books or materials, (b) there has been no special training on Anti-Corruption Education in Social Studies, (c) learning resources are still limited.

© 2026 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C1 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: jurnalsosioliumpips@mail.unnes.ac.id

E-ISSN 2685-4929

PENDAHULUAN

Korupsi sebagai fenomena sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia menimbulkan dampak yang luas dan sistemik, mulai dari kerugian negara, melemahnya keadilan sosial ekonomi, menurunnya kualitas layanan publik, hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Karakter multidimensional korupsi menunjukkan bahwa pencegahan tidak dapat bertumpu pada penindakan hukum semata, melainkan perlu diarahkan pada upaya pembentukan nilai dan penguatan integritas. Pendidikan formal dipandang strategis dalam konteks ini karena berfungsi menanamkan nilai-nilai dasar antikorupsi, termasuk kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kepedulian sosial, sejak usia dini sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa (Afandi, 2025; Zulaiha & Wahyudin, 2024).

Dampak korupsi menimbulkan beberapa konsekuensi yang dapat merusak kepercayaan publik dan merusak berbagai aspek kehidupan. Di sektor ekonomi, korupsi menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya, menghambat investasi, dan mengurangi kepercayaan investor. Korupsi dalam konteks sosial merusak moral dan integritas individu, menciptakan ketidakadilan, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Di tingkat pendidikan, korupsi dapat mengurangi kualitas pendidikan dan merusak generasi muda (Habib, Perdana, & Perdana, 2025). Korupsi menunjukkan angka kerugian yang sangat besar bagi negara, sepanjang tahun 2023 sektor yang merugikan negara terbesar yaitu,

Tabel 1. Kasus Korupsi

Sektor	Angka Korupsi
Telekomunikasi dan informasi	Rp 889 triliun
Perdagangan	Rp 67 triliun
Sumber Daya Alam	Rp 67 triliun
Utilitas	Rp 326 triliun

Sumber: Jurnal Habib dkk., 2025

Oleh sebab itu, sangat diperlukan tindakan nyata dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi sejak dini. Salah satu cara pencegahan dan pemberantasan korupsi sejak dini adalah dengan menanamkan nilai-nilai

antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas melalui pendidikan di sekolah.

Pendidikan antikorupsi dalam kajian mutakhir dipahami sebagai bagian integral dari pendidikan karakter yang berorientasi pada pembentukan nilai, moral, dan integritas peserta didik. Orientasi tersebut menempatkan pendidikan antikorupsi tidak semata sebagai transfer pengetahuan tentang definisi, bentuk, dan dampak korupsi, melainkan sebagai proses internalisasi nilai yang mendorong kesadaran etis, komitmen terhadap kejujuran, serta kemampuan menolak praktik penyimpangan dalam kehidupan sehari-hari (Fauzurrohim, 2023; Zhafarina & Bantam, 2021). Penguatan pendidikan antikorupsi juga diarahkan pada pembentukan kebiasaan berperilaku berintegritas melalui pengalaman belajar, pembiasaan di lingkungan sekolah, dan penguatan kultur akademik yang menjunjung keadilan serta akuntabilitas (Zulaiha & Wahyudin, 2024).

Pada permenristekdikti no 33 tahun 2019 menjelaskan bahwa Pendidikan antikorupsi adalah proses pembelajaran dan pembentukan perilaku pencegahan tindak korupsi. Hal ini menjadi dasar kuat pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada jenjang sekolah. Pendidik memiliki peran penting dalam menyisipkan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran. Dan setiap warga sekolah mengambil peran penting pencegahan gratifikasi dalam bentuk apapun di sekolah. Salah satu bentuk nyata dari pendidikan antikorupsi yaitu adanya koprasu kejujuran, koprasu tersebut menjadi alat untuk peserta didik belajar melakukan nilai-nilai antikorupsi. Peserta didik juga memahami makna pendidikan antikorupsi secara nyata dengan praktik.

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum nasional, sehingga implementasinya menuntut peran aktif sekolah dan guru dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran yang terencana, kontekstual, dan bermakna (Afandi, 2025; Zulaiha & Wahyudin, 2024). Integrasi tersebut relevan untuk dikembangkan melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial karena IPS memuat kajian sosial, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan yang

memungkinkan peserta didik memahami dampak korupsi terhadap tatanan kehidupan, menganalisis ketidakadilan sosial, serta mengembangkan nalar etis melalui pembelajaran berbasis kasus, diskusi nilai, dan refleksi kritis (Novianti et al., 2023; Putri, 2023). Penguatan pendidikan antikorupsi melalui IPS diharapkan tidak berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi juga mendorong pembentukan sikap dan perilaku berintegritas dalam aktivitas belajar dan kehidupan sekolah.

Internalisasi nilai-nilai antikorupsi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum berlangsung secara efektif dalam praktik pembelajaran. Proses pembelajaran masih cenderung menempatkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai pengetahuan normatif yang disampaikan secara verbal, tanpa dukungan strategi pedagogis yang mendorong kesadaran moral dan pembiasaan perilaku. Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya kesenjangan antara pemahaman kognitif peserta didik mengenai antikorupsi dan kemampuan mereka untuk menerapkan nilai tersebut secara konsisten dalam kehidupan sekolah serta interaksi sosial sehari-hari (Kholiq, 2022; Zuber, 2018).

Penelitian pendidikan antikorupsi di Indonesia masih cenderung bertumpu pada kajian konseptual, normatif, dan kebijakan pendidikan karakter, sehingga menghasilkan rekomendasi umum, tetapi belum memetakan secara rinci bagaimana nilai antikorupsi ditransformasikan menjadi pengalaman belajar yang terukur dan berdampak dalam pembelajaran di kelas. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa mekanisme implementasi yang efektif pada konteks pembelajaran tertentu masih belum terjabarkan secara memadai. Keterbatasan berikutnya tampak pada minimnya penelitian yang secara spesifik menganalisis implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS pada jenjang SMP. Kajian terdahulu lebih banyak berfokus pada PPKn, sementara potensi strategis IPS sebagai ruang pembelajaran kontekstual yang membahas isu sosial ekonomi sejarah dan relasi kekuasaan belum dikaji secara mendalam, padahal IPS relevan untuk membangun pemahaman dan sikap integritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesenjangan juga muncul pada aspek

konteks lokal dan keluasan cakupan kajian. Penelitian kontekstual yang mengaitkan penguatan pendidikan antikorupsi dengan dinamika sosial budaya wilayah perkotaan seperti Kota Semarang masih terbatas, sehingga faktor lingkungan sekolah dan lingkungan sosial sebagai pendukung atau penghambat belum tergali secara utuh. Penelitian yang mengkaji implementasi secara holistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran IPS, termasuk respons peserta didik sebagai indikator kebermaknaan pembelajaran, juga masih kurang, sehingga diperlukan kajian komprehensif untuk menjelaskan keterpaduan proses dan capaian internalisasi nilai antikorupsi di SMP Negeri 1 Kota Semarang.

Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah juga masih dominan berorientasi pada aspek teoritis dan penyampaian materi, sehingga belum menyentuh secara memadai dimensi afektif dan perilaku yang menjadi tujuan utama pendidikan karakter. Pembelajaran sering kali belum dikaitkan dengan situasi nyata yang dekat dengan pengalaman peserta didik, seperti praktik ketidakjujuran sederhana, penyalahgunaan amanah, atau ketidakadilan dalam lingkungan sekitar. Akibatnya, pendidikan antikorupsi berpotensi berhenti sebagai wacana normatif dan kurang berdampak terhadap perubahan sikap serta perilaku berintegritas pada diri peserta didik (Cahyono et al., 2020; Zulaiha & Wahyudin, 2024).

Permasalahan tersebut semakin menguat ketika integrasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS belum memiliki pola yang terstruktur dan berkelanjutan, baik dalam perencanaan tujuan, pemilihan materi, penerapan metode, maupun penilaian. Nilai-nilai antikorupsi kerap disisipkan secara insidental dan belum dirancang sebagai penguatan yang sistematis, padahal IPS memiliki ruang yang relevan untuk mengkaji isu sosial dan ketidakadilan secara kontekstual. Keterbatasan guru IPS dalam strategi pembelajaran yang reflektif dan partisipatif, serta keterbatasan dalam pengembangan instrumen evaluasi sikap dan perilaku yang objektif, turut menjadi faktor penghambat sehingga penguatan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS belum terlaksana secara optimal (Kristiono et al., 2020; Pujowati et al., 2024; Ratih et al., 2021).

Permasalahan yang ditemukan di SMP

Negeri 1 Semarang yaitu bahwa penerapan pendidikan antikorupsi dalam realitasnya masih belum diimplementasikan secara optimal oleh peserta didik. Sebagai contoh, masih terdapat peserta didik yang melanggar peraturan sekolah seperti membolos saat jam pelajaran dan tidak mengikuti sholat berjamaah serta tidak jujur dalam mengerjakan ulangan. Hal tersebut menunjukkan meskipun nilai-nilai antikorupsi telah diimplementasikan melalui program sekolah, tetapi dalam realitasnya belum semua peserta didik mampu mengimplementasikan nilai antikorupsi secara optimal. Oleh karena itu diperlukan penguatan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran untuk memberikan pemahaman secara realitas kepada peserta didik.

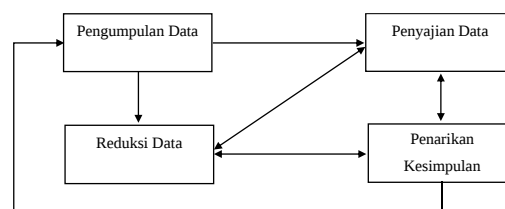
Pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh SMP Negeri 1 Semarang. Dalam pembelajaran IPS peserta didik diminta untuk menganalisis kasus-kasus korupsi sederhana agar siswa dapat berpikir kritis. Siswa diajak untuk memahami akibat dari tindakan korupsi dan pencegahan dari tindakan korupsi, sehingga siswa dapat memahami konsekuensi yang akan terjadi jika mereka melakukan hal tersebut. Selain itu, siswa memahami antikorupsi melalui pembelajaran IPS yang terintegrasi dengan pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi terkandung atau terselip dalam pembelajaran dan materi IPS. Sehingga penguatan pendidikan antikorupsi mudah dilakukan melalui pembelajaran IPS dan siswa juga mudah memahami nilai-nilai Antikorupsi melalui kasus nyata.

Temuan penelitian pada pembelajaran IPS menunjukkan bahwa integrasi nilai karakter dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran sosial dan sikap kewarganegaraan peserta didik karena IPS menyediakan ruang kajian kontekstual tentang dinamika sosial, ekonomi, sejarah, dan kehidupan bernegara (Maisaroh & Untari, 2024). Perkembangan berikutnya menonjolkan pendekatan pembelajaran kontekstual seperti *problem based learning* dan *project based learning* karena menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis sebab akibat, mengambil keputusan, serta merancang solusi berbasis nilai (Ramadhan

et al., 2024; Sabrifha, 2025). Keterlibatan aktif melalui diskusi kasus dan proyek kewarganegaraan antikorupsi dinilai mampu memperkuat internalisasi etika dan integritas secara lebih bermakna (Ramadhan et al., 2024).

METODE

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Latar penelitian ini di SMP Negeri 1 Semarang yang berada di jalan Ronggolawe Timur., Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Fokus penelitian adalah penguatan Pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Semarang. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif. Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa proses pengumpulan data dilakukan pada tiga tahap kegiatan penting yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*verification*). Berikut adalah proses penyajian:



Gambar 1. Bagan Komponen analisis data Model interaktif

Sumber: Miles dan Huberman

(dalam (Sugiyono, 2014), halaman: 92)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang

Pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Semarang merupakan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang dibawah Inspektorat dan KPK berdasarkan keputusan Wali Kota Semarang Nomor 421/1103 Tahun 2023 Tentang Penetapan sekolah pelaksana program Sekolah Jujur Sekolah Saya di Kota

Semarang. Program SJSS atau Pendidikan Antikorupsi terbentuk atas latar belakang permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin marak. Permasalahan korupsi tersebut memerlukan upaya preventif guna melakukan pencegahan sejak dini pada generasi penerus bangsa agar tidak melakukan korupsi.

SMP Negeri 1 Semarang merupakan salah satu sekolah pelaksana program Sekolah Jujur Sekolah Saya. Lewat program tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang berharap Pendidikan Antikorupsi dapat diterapkan melalui pembelajaran. Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang memiliki program khusus yang menanamkan karakter Antikorupsi seperti KOJURAN (Koprasi Kejujuran), NEMULEGI (Menemukan Kembali Lagi), dan PONI (Pohon Aku Berani).

Implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan melalui program khusus yang dikembangkan oleh sekolah. Melalui program tersebut warga sekolah diajak untuk dapat memperkuat dan merawat karakter antikorupsi. Program ini dibentuk sebagai pembiasaan Pendidikan Antikorupsi yang terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Kerjasama dari seluruh warga sekolah menciptakan lingkungan bebas korupsi dan sadar gratifikasi.

Pelaksanaan “Program Sekolah Jujur Sekolah Saya”

Pendidikan antikorupsi merupakan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai upaya mendorong generasi muda menolak gerakan gratifikasi dan pencegahan sejak dini. Pembiasaan penanaman nilai karakter antikorupsi menjadi permulaan perwujudan pendidikan antikorupsi. Pencegahan kasus korupsi menjadi hal krusial yang harus ditindak lanjuti sebagai upaya menyiapkan generasi muda unggul dan bebas korupsi. Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang penunjukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang dibawah naungan inspektorat dan KPK melalui bidang Pendidikan berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 421/1103 Tahun 2023 tentang penetapan sekolah pelaksana program Sekolah

Jujur Sekolah Saya di Kota Semarang. Program tersebut selanjutnya diterapkan dalam implementasi Pendidikan melalui pembelajaran IPS, PPKN, Agama, dan Penjaskes.

Program ini telah dilaksanakan di 30 institusi pendidikan yang berada di Semarang, terdiri dari 15 sekolah dasar dan 15 sekolah menengah pertama. Salah satu lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang adalah SMP Negeri 1 Semarang. Implementasi pendidikan yang melawan korupsi di sektor pendidikan untuk generasi mendatang dilakukan dengan langkah-langkah yang berkelanjutan. Ini mencakup kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian di bawah arahan inspektorat serta KPK dalam bidang pendidikan. Di Indonesia, bidang pendidikan formal memiliki peran penting dalam mencegah tindakan korupsi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya yang direncanakan dan dilaksanakan dengan kesadaran untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka secara aktif.

SMP Negeri 1 Semarang menjadi salah satu sekolah di Kota Semarang yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang untuk melaksanakan program “Sekolah Jujur Sekolah Saya” sebagai penerapan pendidikan antikorupsi. Di dalam program tersebut terdapat beberapa program yang dikembangkan oleh sekolah secara khusus untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi di lingkungan SMP Negeri 1 Semarang. Program Sekolah Jujur Sekolah Saya di SMP Negeri 1 Semarang terbentuk sejak Februari 2024 setelah dikeluarkannya kebijakan dan ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi sebenarnya SMP Negeri 1 Semarang sudah melaksanakan pendidikan antikorupsi sejak 2014 sebelum ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat 3 program yang dikembangkan oleh SMP Negeri 1 Semarang yaitu:

a. KONJURAN (Koprasi Kejujuran)

KONJURAN merupakan koprasi kejujuran yang di kelola oleh AGEN SEMAI (Sembilan Nilai Antikorupsi) bersama Duta Koprasi. KONJURAN dibentuk untuk membiasakan peserta didik mandiri yaitu self

service dan jujur serta bertanggung jawab. KONJURAN diawasi oleh CCTV dan setiap peserta didik yang melakukan pembelian akan mencatat di buku.

b. NEMULEGI (Menemukan Kembali Lagi)

NEMULEGI merupakan program ketika warga sekolah menemukan barang dan kehilangan barang akan melapor. Barang yang ditemukan akan diumumkan lewat speaker sekolah dan akan disimpan di lemari selama 3 bulan. AGEN SEMAI setiap 3 bulan sekali akan berkeliling ke kelas untuk menawarkan barang-barang yang ditemukan, jika tidak ada pemiliknya maka barang akan diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan.

c. PONI (Pohon Aku Berani)

PONI merupakan pohon aku berani berisi tulisan-tulisan perbuatan yang berhubungan dengan sembilan nilai antikorupsi. Contohnya ketika peserta didik menemukan barang dan melaporkan kepada guru, atau peserta didik menolong teman yang kesulitan belajar. Melalui PONI peserta didik dipacu untuk berani menunjukkan perbuatan Antikorupsi.

Program unggulan yang dikembangkan oleh sekolah menjadi strategi utama dalam mendorong peserta didik untuk menanamkan karakter antikorupsi. Melalui program KONJURAN peserta didik dilatih untuk mengembangkan sikap berani, jujur, bertanggung jawab, mandiri, dan disiplin dalam bertransaksi tanpa pengawasan. Program ini memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik tentang pentingnya kejujuran sebagai dasar dalam membangun integritas diri. Pada program NEMULEGI peserta didik diajarkan untuk mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Melalui kegiatan ini, karakter jujur, berani, dan peduli menjadi fokus utama peserta didik menumbuhkan kebiasaan antikorupsi. Sementara pada program PONI peserta didik diajarkan untuk berani mengungkapkan keinginannya dan peduli terhadap teman yang sedang membutuhkan. Implementasi pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang dilakukan melalui pembiasaan yang dikemas dalam program khusus. Melalui ketiga program tersebut

peserta didik dibentuk menjadi pribadi yang paham korupsi dan antikorupsi.

Keberhasilan implementasi pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang tidak lepas dari peran aktif warga sekolah. Keterlibatan warga sekolah dalam pelaksanaan program khusus menjadi faktor penting. Terutama peran peserta didik dalam melaksanakan program KONJURAN, NEMULEGI, dan PONI. Peserta didik tidak hanya memahami konsep dan nilai-nilai antikorupsi melainkan mampu terlibat langsung dalam mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi. Habit dan budaya antikorupsi di sekolah menjadi aspek pendukung terciptanya karakter antikorupsi. Dengan terbentuknya budaya tersebut, warga sekolah akan terbiasa dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi

SMP Negeri 1 Semarang telah melaksanakan penguatan pendidikan antikorupsi melalui pembiasaan. Pembiasaan tersebut diwujudkan dalam program khusus yang dikembangkan oleh sekolah yaitu KONJURAN, NEMULEGI, dan PONI. Melalui program tersebut, pembiasaan dibangun secara konsisten untuk menciptakan implementasi nilai-nilai antikorupsi secara nyata. Budaya antikorupsi yang dibangun di lingkungan sekolah menumbuhkan karakter peserta didik. Karakter peserta didik dibangun untuk pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini. Implementasi ini tidak hanya bersifat simbolik tetapi dirancang secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan agar nilai-nilai antikorupsi dapat terinternalisasi dalam sikap serta perilaku peserta didik. Sekolah tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik. Peserta didik diajarkan untuk memiliki sikap menolak dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi. Implementasi program tersebut juga didukung oleh pengelolaan yang melibatkan peserta didik sebagai agen perubahan seperti melalui peran AGEN SEMAI.

Pembiasaan sederhana yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran mengingatkan peserta didik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Antikorupsi. Guru IPS memiliki strategi yang tepat dalam memperkuat penanaman Pendidikan Antikorupsi melalui pembelajaran. Pembiasaan yang dilakukan guru dalam pembelajaran biasanya

seperti mengingatkan peserta didik untuk menjunjung tinggi kejujuran, bertanggung jawab, dan mandiri saat mengerjakan ujian. Penerapan pendidikan antikorupsi ditanamkan melalui pembelajaran IPS yang terstruktur. Sehingga guru IPS harus memiliki strategi dalam memperkuat penanaman pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS. Strategi tersebut berupa penggunaan metode diskusi kasus, refleksi nilai, memberikan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta konsistensi dalam menegakkan aturan. Penguatan pendidikan antikorupsi melalui teladan yang ditunjukkan oleh guru menjadi bagian penting bagi peserta didik melihat dan meniru. Strategi yang tepat akan mencetak peserta didik paham implementasi dari nilai-nilai antikorupsi.

Penguatan Pendidikan Antikorupsi Melalui Pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Semarang

Pembelajaran IPS memiliki pemahaman mengenai studi prinsip, cita-cita, dan kewarganegaraan dalam demokrasi. Sehingga ilmu pengetahuan sosial mampu memberikan pengetahuan peserta didik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Peserta didik sebagai generasi muda mengambil peran penting dalam mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Bentuk dari tindakan tersebut berupa keberanian dalam menyampaikan pendapat di kelas, jujur dalam mengerjakan ujian, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas sekolah, dan kepedulian sosial terhadap kondisi di lingkungan sekitar.

Penerapan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS tentunya dikaitkan oleh guru IPS melalui materi yang relevan dengan nilai-nilai antikorupsi. Penguatan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Semarang diintegrasikan dalam empat aspek yaitu melalui materi pembelajaran IPS, perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran. Berikut beberapa strategi yang dilakukan oleh guru dalam penguatan pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang.

Materi Pembelajaran IPS

Pendidikan antikorupsi dalam penerapannya tentunya diinsersikan melalui

materi pembelajaran IPS yang relevan dengan nilai-nilai Antikorupsi. Seperti materi pembelajaran kelas 7 yang membahas mengenai nilai dan norma sosial dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Antikorupsi yang relevan dengan fenomena sosial. Sedangkan dalam materi pembelajaran kelas 8 mengenai mobilitas sosial dan organisasi profesi politik dapat dikaitkan dengan nilai-nilai antikorupsi dan fenomena yang terjadi dalam lembaga pemerintahan. Nilai-nilai antikorupsi seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian sosial menjadi sorotan utama dalam materi tersebut.

Penerapan materi kelas 9 tentang perkembangan ekonomi digital dikaitkan dengan nilai-nilai antikorupsi seperti mandiri, tanggung jawab, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut mengacu pada pencegahan penipuan secara online dan pemahaman digital finansial. Guru IPS selalu berusaha menerapkan Pendidikan Antikorupsi dalam pembelajaran IPS melalui strategi-strategi untuk memberikannya pemahaman kepada peserta didik. Pembelajaran IPS telah dikaitkan dengan nilai-nilai antikorupsi dengan menyelipkan kedalam materi ajar yang relevan. Meskipun dalam materi IPS belum secara keseluruhan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai antikorupsi tetapi guru IPS selalu berupaya menyelipkan dalam pembelajaran.

Perencanaan Pembelajaran

Pendidikan antikorupsi dalam penerapannya melalui pembelajaran IPS tentunya selalu melakukan perencanaan dengan menyusun nilai-nilai antikorupsi yang relevan dengan materi IPS. Perencanaan pembelajaran IPS terintegrasi dengan pendidikan antikorupsi yang masuk kedalam modul ajar bagian dimensi profil lulusan. Pengintegrasian pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS tentunya dimasukkan dalam media pembelajaran untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang disampaikan. Media dirancang sesuai dengan kebutuhan serta gaya belajar peserta didik.

Namun sampai saat ini guru IPS di SMP Negeri 1 Semarang belum secara langsung menggunakan media pembelajaran dalam penyampaian materi yang terintegrasi pendidikan antikorupsi. Tetapi dalam pembelajaran mereka telah menyelipkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi seperti kemandirian, tanggung jawab, disiplin, jujur, dan adil. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS belum secara maksimal

dalam menyampaikan penerapan nilai-nilai antikorupsi. Strategi yang digunakan oleh guru IPS masih tergolong kurang karena sumber belajar atau modul ajar terbatas.

Proses Pembelajaran

Penguatan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS telah diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan oleh guru IPS di SMP Negeri 1 Semarang, mereka telah menginsersikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dari tahapan perencanaan, proses, hingga penilaian. Guru IPS dalam pembelajaran telah memberikan teladan dari implementasi nilai-nilai antikorupsi melalui sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran dalam mengerjakan tugas sekolah. Proses pembelajaran IPS yang diciptakan oleh guru IPS tentunya menggunakan metode dan pendekatan yang disesuaikan oleh kebutuhan peserta didik dan relevansi materi. Guru IPS tentunya selalu melakukan analisis gaya belajar peserta didik sebelum menerapkan metode dalam pembelajaran.

Penanaman pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS tentunya memerlukan strategi dalam penyampaian. Guru IPS harus memiliki strategi dalam penyampaian pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS supaya materi tersampaikan secara optimal. Seperti halnya yang dilakukan oleh guru IPS di SMP Negeri 1 Semarang memberikan strategi pelaksanaan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS pada proses pembelajaran di kelas. Metode yang digunakan dalam pembelajaran IPS berupa proyek dan diskusi dengan menghubungkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Melalui metode proyek peserta didik diminta untuk mengidentifikasi permasalahan sosial yang berkaitan dengan praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan metode diskusi digunakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan pendapat.

Evaluasi atau Penilaian Dalam Pembelajaran

Evaluasi atau penilaian pembelajaran IPS diinsersikan dengan pendidikan antikorupsi. Asesmen dilakukan melalui *google form* atau menuliskan pemahaman materi di kertas. Dalam asesmen tersebut penerapan nilai-nilai

antikorupsi seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian menjadi penilaian sikap atau karakter dari peserta didik. Penilaian ini mengajarkan peserta didik untuk mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dari hal sederhana di lingkungan sekolah. Setiap pembelajaran IPS berlangsung guru IPS selalu menyelipkan dan menegaskan nilai-nilai pendidikan antikorupsi kepada peserta didik. Penanaman pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS bukan hanya sekedar penerapan tetapi pembiasaan dan budaya yang terus diperkuat. Transparansi penilaian menjadi salah satu bentuk keteladanan guru dalam memperkuat pendidikan antikorupsi pada diri peserta didik. Keterbukaan dalam memberikan penilaian menumbuhkan motivasi peserta didik untuk mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi.

Guru IPS telah melakukan beberapa upaya penerapan pendidikan antikorupsi melalui tahapan materi, perencanaan, proses, dan evaluasi atau penilaian pembelajaran. Dalam pelaksanaannya tentunya menghadapi hambatan, oleh sebab itu diperlukan strategi guru IPS dalam mewujudkan penguatan pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang. Guru IPS dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS perlu menekankan nilai-nilai antikorupsi untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Salah satunya dengan mengkaitkan materi pembelajaran IPS dengan nilai-nilai antikorupsi seperti kemandirian, jujur, disiplin tanggung jawab, dan kepedulian. Secara khusus menghubungkan materi dengan fenomena sosial yang sedang marak atau ramai diperbincangkan, tujuannya untuk memberikan pengalaman peserta didik dalam memahami nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekitar.

Hambatan Dalam Penguatan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 1 Kota Semarang

Penerapan pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang masih menghadapi hambatan dari faktor internal maupun eksternal. Secara umum pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang cukup baik dan berjalan secara optimal, namun dalam terlaksananya program Sekolah Jujur Sekolah Saya masih terdapat hambatan. Hambatan tersebut datang dari dalam sekolah yaitu seperti kurangnya pelaksanaan terhadap pendidikan antikorupsi, belum optimal program pendidikan

antikorupsi, dan modul belum bermuatan pendidikan antikorupsi. Sedangkan hambatan yang datang dari luar yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, kurikulum atau sistem pendidikan yang belum bermuatan pendidikan antikorupsi, serta belum optimalnya zona integritas.

Kurangnya pelaksanaan terhadap Pendidikan Antikorupsi ditandai dengan masih adanya perilaku peserta didik yang tidak tertib dan disiplin. Meskipun pendidikan antikorupsi telah dilaksanakan sejak lama, tetapi pada penerapannya masih terdapat hambatan. Seperti program pendidikan antikorupsi yang dibentuk sekolah yaitu NEMULEGI (Menemukan Kembali Lagi) terkadang belum berjalan secara optimal. Dan dalam pembelajaran guru belum secara langsung memasukkan nilai-nilai antikorupsi kedalam modul ajar. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu keterbatasan sarana dan prasarana seperti banner yang berisi nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Kurikulum yang diterapkan masih bersifat kontekstual dan materi belum menyeluruh membahas pendidikan antikorupsi. Serta zona integritas belum berjalan secara optimal, masih terdapat wali murid yang belum memahami adanya zona integritas.

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang mengalami hambatan dari faktor internal dan eksternal. Selain itu dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS seringkali mengalami hambatan. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan guru IPS telah menggunakan strategi dan metode untuk memperkuat pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS tetapi masih kurang maksimal dalam penyampaian. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hambatan yaitu kurangnya buku atau materi yang secara mendalam dan terpisah membahas Pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS, belum ada pelatihan khusus mengenai Pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS, sumber belajar atau modul ajar masih terbatas sehingga mempersulit guru dalam mengoptimalkan penguatan penanaman nilai-nilai Pendidikan antikorupsi.

SIMPULAN

Implementasi Pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang di tunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang dibawah naungan Inspektorat dan KPK berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 421/1103 Tahun 2023 Tentang Penetapan sekolah pelaksana program Sekolah Jujur Sekolah Saya di Kota Semarang. SMP Negeri 1 Semarang memiliki 3 program khusus yaitu KONJURAN (Koprasi Kejujuran), NEMULEGI (Menemukan Kembali Lagi), PONI (Pohon Aku Berani). Nilai-nilai yang dikembangkan dalam menanamkan Pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang diperkuat melalui program unggulan yang telah menjadi pembiasaan karakter dan budaya sekolah. Sembilan nilai tersebut biasa disingkat dengan nama JUMAT BERSEPEDA KK yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

Penguatan pendidikan antikorupsi melalui Pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Semarang. Penerapannya dilakukan melalui, (a) materi pembelajaran yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi. Seperti kelas 7 mengenai nilai dan norma sosial, potensi ekonomi lingkungan berkaitan dengan kepedulian sosial, adil, bertanggung jawab, dan kerja keras. Materi kelas 8 kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam, kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dikaitkan dengan nilai-nilai antikorupsi seperti sederhana, bertanggung jawab, jujur, peduli, dan adil. Serta materi kelas 9 mengenai perubahan sosial, perkembangan ekonomi digital, dan Pembangunan Indonesia dikaitkan dengan nilai-nilai antikorupsi seperti kepedulian sosial, jujur, tanggung jawab, dan adil. (b) perencanaan modul ajar diintegrasikan dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang masuk dalam bagian dimensi profil lulusan. (c) pengintegrasian pendidikan antikorupsi melalui keteladanan guru dalam mengajar dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas lembaga. (d) evaluasi atau penilaian dengan menyelipkan nilai-nilai antikorupsi dalam menilai karakter peserta didik dan adil dalam memberikan penilaian.

Hambatan dalam penguatan Pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 1 Semarang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yaitu, faktor internal (a) kurangnya pelaksanaan terhadap pendidikan antikorupsi, (b) belum optimal program

pendidikan antikorupsi, (c) Modul belum bermuatan pendidikan antikorupsi. Faktor eksternal yaitu, (a) sarana dan prasarana yang belum memadai, (b) kurikulum atau sistem pendidikan yang belum bermuatan pendidikan antikorupsi, (c) belum optimalnya zona integritas. Sedangkan hambatan dalam penguatan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran IPS yaitu, (a) kurangnya buku atau materi yang secara mendalam dan terpisah membahas pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS, (b) belum ada pelatihan khusus mengenai pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS, (c) sumber belajar atau modul ajar masih terbatas sehingga mempersulit guru dalam mengoptimalkan penguatan penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. R. (2025). Peran Mahasiswa Dalam Edukasi Anti Korupsi: Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Service Learning. *Sarwahita*, 22(02), 216–232. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.222.9>
- Cahyono, C., Mulayana, D., & Sukarlina, L. (2020). *Growing the Character of Responsibility in Students Through Teacher's Exemplary in Anti-Corruption Education Efforts*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.013>
- Habib, M. R., Perdana, R., & Perdana, D. R. (t.t.). *Analisis peran pendidik dalam meningkatkan kesadaran antikorupsi peserta didik di sekolah dasar*.
- Kristiono, N., Munandar, Moh. A., Wiranto, G. H., & Uddin, H. R. (2020). *The Implementation of Anti-Corruption Education in Texmaco Vocational High School Pematang*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.040>
- Maisaroh, A. A., & Untari, S. (2024). Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 18–30. <https://doi.org/10.33701/jkp.v7i1.4347>
- Pujowati, Y., Hasibuan, P. A. S., & Budiono, S. T. (2024). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Di Sekolah Menengah Atas Di Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(1), 23–30. <https://doi.org/10.59024/jpma.v2i1.547>
- Ramadhan, I., Kusumaningrum, Y. D., & Wilujeng, H. T. (2024). Meningkatkan Keaktifan Siswa Melalui Proyek Kewarganegaraan Antikorupsi Di SMK Pawyatan Daha 2 Kediri. *Sosmaniora Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3091>
- Ratih, G. K., Iriani, A., & Dwikurnaningsih, Y. (2021). Kindergarten Teachers Training in Integrating Anti-Corruption Education Through Storytelling and Game. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1628–1639. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1806>
- Sabrifha, E. (2025). Pendidikan Karakter Berbasis Islam: Strategi Kebijakan Dalam Membentuk Generasi Berakhlak. *Aljpai*, 2(4), 370–381. <https://doi.org/10.71242/3jthmz18>
- Sugiyono. (2014). Analisis Selama di Lapangan Model Miles and Huberman. Dalam *Memahami Penelitian Kualitatif* (Vol. 10). ALFABETA.
- Zulaiha, A. R., & Wahyudin, D. (2024). The Urgency of Anti-Corruption Education as a Local Subject in Secondary Education in Lampung Province. *Inovasi Kurikulum*, 21(3), 1545–1562. <https://doi.org/10.17509/jik.v21i3.71162>